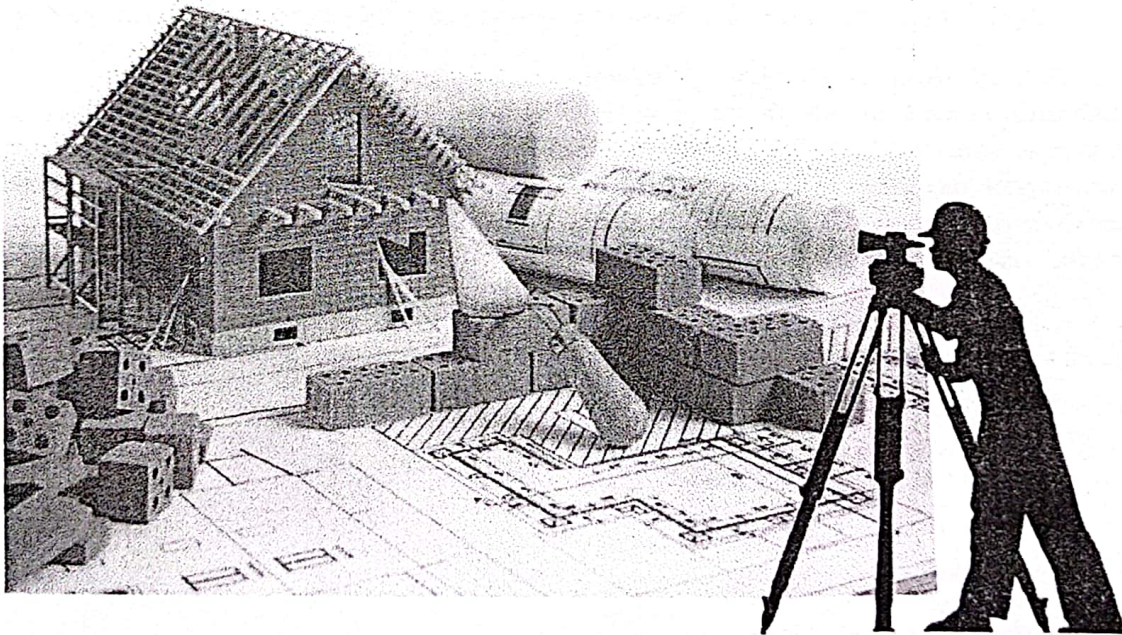




LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2023**



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Sudah selayaknya kita panjatkan puji dan dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka instansi pemerintah diuntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menggambarkan tingkat capaian kinerja yang dalam penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban tentang kinerja OPD selama tahun 2023. Hasilnya diharapkan dapat menjadi media akuntabilitas dan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah secara akuntabel kepada publik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur yang tercinta. Atas bantuan kerjasama semua pihak yang telah mendukung penyusunan LAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2023, disampaikan limpah terima kasih.

Larantuka, 18 Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur



EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP ini dilakukan berdasarkan dokumen realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pengukuran capaian kinerja kegiatan tahun 2023 dengan menggunakan alat ukur dan evaluasi yang sistematis, obyektif, dan transparan dalam rangka kepastian dan akuntabilitas laporan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2023 secara total melaksanakan 6 Program dan 13 Kegiatan. Hasil pengukuran kinerja secara umum pada tahun 2023 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dengan detail Anggaran belanja sebesar Rp. 5.743.011.922, Dengan detail Realisasi Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp. 5.515.524.884. atau prosentase capaian 96,38%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa hasil pengukuran kinerja SKPD dalam skala ordinal ternilai sangat baik.

Larantuka, 18 Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur



EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750910 199412 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		ii
Daftar Isi		iii
BAB I : Pendahuluan		1
A. Latar Belakang		1
B. Gambaran Singkat Organisasi		2
C. Dasar Hukum		4
D. Sistematika Penyusunan		6
BAB II : Perencanaan Kinerja		7
A. Perencanaan		15
B. Perjanjian Kinerja		22
C. Penetapan Kinerja		23
BAB III : Akuntabilitas Kinerja		24
A. Capaian Kinerja Organisasi		24
B. Realisasi Anggaran		26
BAB IV : Penutup		27
Lampiran – lampiran		29

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya mengandung prinsip kedaulatan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan keadilan. Keempat hal tersebut harus diwujudkan oleh sebuah daerah otonom seperti halnya Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mempermudah pelaksanaan tugas pelayanannya kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu membentuk berbagai organisasi baik organisasi pemerintahan maupun kemasyarakatan yang memiliki konstelasi adanya pola kemitraan yang nyata sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang memiliki tujuan akhirnya terwujudnya good governance.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terbentuk dengan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 memiliki dukungan potensi sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas yang variatif untuk mendukung upaya pembangunan di sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta tugas pelayanan kepada



masyarakat secara maksimal berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang ada.

B. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

Dalam upaya penyelenggaraan tugas pemerintahan maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengemban Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- c) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) tersebut diatas menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

- b. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur terdiri dari unsur :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari sub bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan, sub bagian Program, Data dan Evaluasi.
3. Pelaksana adalah bidang dan seksi yang terdiri dari :
 - a. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :
 - Kepala Bidang PKP
 - Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda
 - b. Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah
 - Kepala Bidang PPT
 - Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda
 - c. Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah
 - Kepala bidang Penyelesaian Sengketa Tanah
 - Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda

Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman



dan Pertanahan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

Susunan Kepegawaian :

Data jumlah pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur menurut eselon, pangkat / golongan dan pendidikan :

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian

No	Eselonering		Pangkat		Pendidikan	
	Eselon	Jumlah	Golongan	Jumlah	Tingkat	Jumlah
1	II.b	1	IV.c	1	S2	1
2	III.a	1	IV.b	1	S1	1
3	III.b	3	IV.a	1	S1	1
			IV.b	1	S2	1
			III.d	1	D4	1
4	IV.a	6	III.d	4	S1	4
			III.c	1	D3	1
			III.b	1	D3	1
5	Non eselon	7	III.a	5	S1	1
					SLTA	4
			II.c	1	D3	1
			II.b	1	SLTP	1
6	PKKK		IX	3	S1	3
		11		21		21

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur .



D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

I Perndahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran singkat Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika Penyusunan

II Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Penetapan Kinerja

III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

IV Penutup

Lampiran – Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Rencana Strategis

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2. Menurunkan tingkat kemiskinan	2.1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Adil dan Merata	1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Miskin	2.1.1. Validasi Data Kemiskinan 2.1.2. Peningkatan sarana dan prasarana layak

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis Untuk Mewujudkan pembangunan yang merata berkeadilan dan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama empat tahun



kedepan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya Pembangunan yang merata dan berkelanjutan dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2.

Tujuan dan sasaran indikator kinerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Adil dan Merata	Menurunkan tingkat kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan (<i>Rumah Tidak Layak Huni</i>)	$\frac{32.897}{4}$ $\frac{74.992}{43,86\%}$	500 unit 43,20%	650 Unit 42,33%	700 Unit 41,40	750 Unit 40,40%

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut:



**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi
Dinas**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Tercapainya Kebutuhan Yang Adil dan Merata	Belum Terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk miskin	Belum tersedianya data validasi kemiskinan Rendahnya Sarana dan Prasarana Layak

a. Program dan Kegiatan :

Program adalah kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program / kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebeleur
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan aset tak berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha
 - Penyusunan/Review/Legalisasi/ Kebijakan Bidang PKP

- b. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepeuluh) Ha
Sub Kegiatan :

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

3) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

- a. Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Sub Kegiatan :

- Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian

4) PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5) PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Kegiatan : Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6) PROGRAM REDRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Kegiatan : Penetapan Subjek dan Objek, Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

B. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan rencana kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran. Adapun rencana kerja anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 adalah :

Uraian Program/Kegiatan	Target	
	Kinerja	Anggaran
		5,743,011,922
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		2,208,971,642
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	83,787,380
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	2	49,729,410
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2	11,725,850
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	10,686,410
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	11,645,710
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	1,738,003,351
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	$\frac{25}{14}$	1,678,003,656
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	44,999,700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	14,999,995

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2	9,999,960
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	9,999,960
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	11,540,625
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	11,540,625
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	32	160,691,660
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	24,999,100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	4,999,900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	19,993,000
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	2	24,999,660

Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	1	1,200,000
Fasilitas Kunjungan Tamu	12	15,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	69,500,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD		-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	-	-
Pengadaan Mebel	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-
Pengadaan Aset tak Berwujud	-	-
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	140,280,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	29,980,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	108,800,000

<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	13	64,668,666
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	36,793,876
Pemeliharaan Mebeleur	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-
Pemeliharaan aset tak berwujud	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	19,999,790
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2,925,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	4,950,000
<i>Program Kawasan Permukiman</i>		3,259,041,025
<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha</i>	2	588,239,430
Penyusunan/Review/Legalisasi/ Kebijakan Bidang PKP	2	588,239,430
<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha</i>	620	2,670,801,595
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	620	2,670,801,595

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		229,999,960
<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	2	229,999,960
Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	2	229,999,960
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		24,999,990
<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	3	24,999,990
Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	24,999,990
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		-
<i>Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	-	-
PROGRAM RETRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		19,999,305

Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	19,999,305
Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	10	19,999,305

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan sebuah pernyataan keseriusan sebuah instansi pelaksana program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan instansi / lembaga / unit kerja / satuan kerja dengan Bupati Flores Timur. Substansi daripada perjanjian kinerja ini mempunyai muatan tanggung jawab instansi / lembaga / unit kerja / satuan kerja untuk dapat mencapai target kinerja sesuai perencanaan. Proses penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta penjabaran program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan OPD pada tahun yang bersangkutan dengan dukungan sejumlah anggaran yang dirinci secara detail pada masing – masing kegiatan. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai bukti keseriusan pelaksanaan tugas oleh OPD penyelenggara program dan kegiatan maka dibuatlah perjanjian kinerja antara Bupati Flores Timur dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat dalam lampiran LAKIP ini.

D. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen organisasi yang baik. Rencana kinerja akan menjadi pedoman bagi pemegang kendali manajemen organisasi dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diharapkan, dan dapat digunakan sebagai alat kontrol apakah organisasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai perencanaan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran berjalan perlu dimasukkan dalam dokumen penetapan Rencana Kinerja Tahunan. Pada tahun 2023, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melaksanakan 6 Program, 13 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan yang tersebar di tiga bidang dan dua sub bagian pada sekretariat dinas. Program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahun anggaran 2023 disertakan dengan dukungan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan – kegiatan dimaksud agar dapat terealisasi secara baik pada tahun 2023. Rincian jumlah program dan kegiatan tahun 2023 dapat terekam dalam Tabel Penetapan Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bagian ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan /kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Renstra OPD dan Penetapan Kinerja 2023.

Analisis Capaian Kinerja terhadap masing – masing sasaran dan indikator kinerja pada tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi/Kebijakan Bidang PKP, Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP dengan dukungan anggaran sebesar Rp.588.239.430 dan Ralisasi RP.582.741.930 atau persentase 99,07.
2. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Target pembangunan RTLH pada Tahun 2023 adalah 620 Unit dengan realisasinya 145 Unit dari sumber dana APBD II dengan Dukungan anggaran sebesar Rp. 2.670.801.595,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.670.781.200.- atau capaiannya Persentase sebesar 99,99%
3. Program Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka penyediaan Prasarana sarana dan Utilitas Umum Perumahan Meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Frungsi Hunian dengan Alokasi Anggaran APBD II Sebesar Rp. 229.999.960 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 229.746.600 atau Capaian 99,88 %.
4. Kegiatan inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota, sasaran pencapaian target pada tahun 2023 adalah Meminimalisir Konflik Pertanahan Publik di Kabupaten Flores Timur. Jumlah Kecamatan yang dapat

difasilitasi yaitu Kec. Wotanulumado, Kec. Adonara Barat. Ketersediaan pagu anggaran untuk membiayai kegiatan ini adalah Rp. 24.999.990,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp. 24.923.800,- atau Capaian 99.69 %.

5. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kab/Kota . Jumlah pagu anggaran yang disediakan adalah Rp. 19.999.305,- dengan tingkat realisasi mencapai Rp. 19.896.600,- atau Capaian 99,48%.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2023 telah diupayakan dilakukan secara optimal dengan dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Total pagu anggaran yang disediakan mencapai Rp. 5.743.011.922, Dengan detail Realisasi Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp. 5.515.524.884. atau prosentase capaian 96,38%. Sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun 2023 adalah Rp. 227.487.038,- atau 3,62% Penjabaran perbandingan antara target dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel realisasi keuangan tahun 2023. *(Lampiran 1)*

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, merupakan media akuntabilitas yang digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel. Melalui penyajian LAKIP ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang termuat Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur selama tahun 2023 dinilai sangat baik apabila dilihat dari pencapaian secara umum.

Menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun 2023, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin dengan membangun kesamaan persepsi dan kesatuan pemahaman terhadap semua persoalan dengan berbagai pihak yang berkompeten sehingga pada tahun – tahun mendatang pencapaian hasil akan lebih baik sesuai harapan.

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

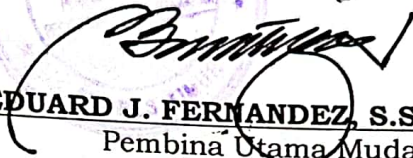
- a. Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur secara umum melaksanakan 6 program, 13 Kegiatan dan 47 Sub kegiatan baik program OPD maupun program urusan dengan 6 sasaran yang hendak dicapai.
- b. Pengukuran capaian kinerja sebesar 96,38% dalam skala ordinal penilaian, dinilai sangat baik.
- c. Hasil dari program dan kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan baik walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai target.
- d. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya : faktor intervensi masyarakat, mekanisme proses, alokasi waktu pelaksanaan kegiatan, faktor kualitas / ketersediaan SDM pengelola kegiatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan juga belum memadai.

Terhadap berbagai program dan kegiatan serta kendala yang dihadapi sebagaimana terjabar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengharapkan adanya informasi balik berupa masukan-masukan yang sifatnya konstruktif dalam berbagai kebijakan yang senantiasa dapat dilaksanakan sesuai kondisi obyektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap dimensi. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan melalui laporan ini, kiranya dapat menjadi bahan informasi / evaluasi dan kajian untuk perencanaan

pembangunan kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas
selanjutnya.

Larantuka, 18 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. FLORES TIMUR,


EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750910 199412 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

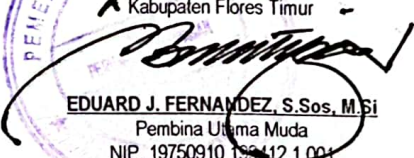
PERJANJIAN KINERJA REVISI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023

NO	Sasaran Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR						5,743,011,922
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
Meningkatnya Nilai Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100			83,787,380
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah (Doc)	2	Doc		49,729,410
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2	Doc		11,725,850
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD (Doc)	3	Doc		10,686,410
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah (Doc)	5	Doc		11,645,710
Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100			1,738,003,351
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (orang /bulan)	25/14	08		1,678,003,656
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun (Dokumen)	1	Doc		44,999,700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	Laporan		14,999,995
Meningkatnya Nilai Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	2			9,999,960
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	2	Laporan		9,999,960
Meningkatnya Nilai Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2			11,540,625
	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	1	Doc		11,540,625
Meningkatnya Nilai Layanan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100			160,691,660
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2	Paket		24,999,100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	Paket		4,999,900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang Disediakan (paket)	2	Paket		19,993,000
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (paket)	2	Paket		24,999,660

NO	Sasaran Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan (dok)	1	Doc	1,200,000
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(laporan)	12	Laporan	15,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat (laporan)	12	Laporan	69,500,000
	Meningkatnya nilai layanan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)			140,280,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	Laporan	1,500,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan)	12	Laporan	29,980,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran yang di Sediakan (laporan)	12	Laporan	108,800,000
	Meningkatnya Nilai Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)			64,668,666
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang di Layani perizinan (3 Unit Roda 2 dan 1 Unit Roda 4 serta Biaya Pemeliharaan (unit)	4	Unit	36,793,876
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Di Pelihara (unit)	1	Unit	19,999,790
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di Pelihara (unit)	2	Unit	2,925,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan pendukung Gedung Kantor yang di Pelihara (unit)	6	Unit	4,950,000
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
2	Program Kawasan Permukiman		Cakupan rumah layak huni (%)			
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha	Jumlah dokumen Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha (dok)	2		588,239,430
		Penyusunan/Review/Legalisasi/ Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/terview/ terlegalisasi (Dok)	2	Doc	588,239,430
	Terlaksananya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha (unit)	0		2,670,801,595
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (unit rumah)	145	unit	2,670,801,595
3	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan		Cakupan PSU (%)			
	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan Prasarana sarana dan Utilitas (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi PSU	2		229,999,960
		Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian (Lokasi)	2	Lokasi	229,999,960

NO	Sasaran Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Persentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)			
	Tersusunnya dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (dok)	3		
		Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	Doc	24,999,990
5	Program Retribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tahan Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		Persentase Luas lahan yang bersertifikat (%)			
	Tersusunnya dokumen sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah (dok)	4		19,999,305
		Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah (dokumen)	4	Doc	19,999,305

Kepala Dinas Perumahan
 Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Kabupaten Flores Timur


EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750910 199412 1 001

REALISASI ANGGARAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2023

No	OPD Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Ket
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5	5,743,011,922	7	5,515,524,884	9
1	Uraian Perumahan kawasan permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		2,208,971,642		1,987,434,754	
		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	83,787,380	12	83,632,900	
		Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	2	49,729,410	2	49,681,400	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2	11,725,850	2	11,667,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	10,686,410	3	10,646,700	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	11,645,710	5	11,637,800	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	1,738,003,351	4	1,548,292,930	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	$\frac{25}{14}$	1,678,003,656	$\frac{25}{14}$	1,488,661,530	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	44,999,700	2	44,995,000	

No	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Ket
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	14,999,995	2	14,636,400	
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2	9,999,960	2	9,957,000	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-		-	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	9,999,960	2	9,957,000	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	-		-	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	11,540,625	1	9,531,100	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-		-	
			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	11,540,625	1	9,531,100	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-		-	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-		-	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	32	160,691,660	33	150,913,224	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-		-	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	24,999,100	2	22,965,000	

No	OPD Pelaksana	Urutan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Ket
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	4,999,900	2	4,995,000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	19,993,000	2	13,194,224	
			Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	2	24,999,660	2	24,844,000	
			Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	1	1,200,000	1	600,000	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	12	15,000,000	12	15,000,000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	69,500,000	12	69,315,000	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD</i>		-		-	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	-	-	-	-	
			Pengadaan Mebel	-	-	-	-	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	
			Pengadaan Aset tak Berwujud	-	-	-	-	
			Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	
			Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	

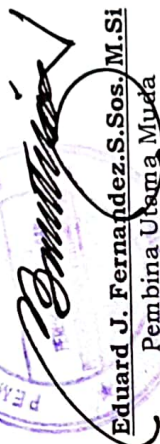
No	OPD Pelaksana	Urutan Pemerintah	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Ket
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	140,280,000	38	124,183,100	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1,500,000	12	1,480,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	29,980,000	12	16,303,100	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	108,800,000	14	106,400,000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	64,668,666	13	60,924,500	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	36,793,876	4	34,500,000	
			Pemeliharaan Mebeleur	-	-	-	-	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	
			Pemeliharaan aset tak berwujud	-	-	-	-	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	19,999,790	1	19,099,500	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2,925,000	2	2,375,000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	4,950,000	6	4,950,000	

No	OPD Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Urutan Pemerintahan	Target		Realisasi		Ket
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1			3	5	6	7	8	9
2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Program Kawasan Permukiman			3,259,041,025		3,253,523,130	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha		2	588,239,430	2	582,741,930	
		Penyusunan/Review/Legalisasi/ Kebijakan Bidang PKP		2	588,239,430	2	582,741,930	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha		620	2,670,801,595	145	2,670,781,200	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		620	2,670,801,595	145	2,670,781,200	
3		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			229,999,960		229,746,600	
		Urutan Penyelenggaraan PSU Perumahan		2	229,999,960	2	229,746,600	
		Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian		2	229,999,960	2	229,746,600	
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		24,999,990		24,923,800	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		3	24,999,990	3	24,923,800	
		Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3	24,999,990	3	24,923,800	

No	OPD Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi		Ket
				Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
5		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-			-
		<i>Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	-			-
6		PROGRAM RETRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	19,999,305		19,896,600	
		<i>Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	10	3	19,896,600	

No	OPD Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Ket
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1			5	6	7	8	9
		Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	10	19,999,305	3	19,896,600	

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,


Eduard J. Fernandez, S.Sos./M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19750910 199412 1 001